

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan atau badan usaha selalu membutuhkan tenaga kerja manusia, dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan adalah orang yang digaji oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan sangat tergantung pada karyawan. Peran serta karyawan ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam rangka pencapaian tersebut maka diperlukan balas jasa karyawan, dalam hal ini pemberian gaji.

Gaji merupakan balas jasa terhadap para pekerja dari pemberi kerja yang bergabung dalam kegiatan usaha yang menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa. Pemberian gaji yang sesuai dengan golongan pegawai, jabatan, lama bekerja dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kesejahteraan seorang karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus memberi imbalan jasa secara wajar sesuai dengan prestasi yang dimiliki masing-masing karyawan dan apa yang diharapkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan.

Prosedur pembayaran gaji merupakan kegiatan rutin perusahaan setiap bulannya. Pembayaran gaji merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang relatif cukup besar. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem

yang baik dan jelas dalam hal ini penggajian agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam transaksi sehingga terciptanya transparansi antara perusahaan dengan karyawan agar tidak terjadinya kerugian.

Salah satu pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat baik bagi negara.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan sumber pendapatan negara. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penerimaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa gadai yang memiliki sumber daya manusia yang besar. PT. Pegadaian (Persero) memiliki banyak kegiatan transaksi

pembayaran melalui kas dan bank. Salah satu transaksi keuangan adalah pembayaran gaji karyawan.

Adapun fungsi yang terkait dalam prosedur pembayaran gaji pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado yaitu melalui fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), fungsi Akuntansi dan fungsi Keuangan.

Dalam pemungutan PPh 21 menurut PT. Prgadaian (Persero) Kanwil V Manado yaitu terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan cara pembayaran PPh 21 melalui bank dengan mengisi format pada e-biling terlebih dahulu.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul tugas akhir “PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI DAN PEMOTONGAN PPH 21 PADA PT . PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL V MANADO”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran gaji pegawai pada PT . Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado?
2. Bagaimana cara pembayaran PPh 21 PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji yang di terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.
2. Untuk menegetahui cara pembayaran PPh 21 di PT. Pegadaian (Perero) Kanwil V Manado

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi peulis

Memperoleh dan menemukan bagaimana dunia kerja dalam prosedur pembayaran gaji yang sesungguhnya di PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dan koreksi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Bagi peneliti lain (Pembaca)

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penulis Deskriptif Komparatif yaitu metode yang menggambarkan, menguaraikan, menjelaskan dan melakukan perbandingan data dari hasil

penelitian dengan perlakuan yang berbeda tentang praktek Prosedur Pembyaran Gaji dan Pemotongan PPh 21 PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado.

1.6 Diskripsi Umum PT. Pegadaian (Persero)

a. Sejarah singkat Perusahaan

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*liecentie stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa

yang disebut dengan "cultuur stelsel di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

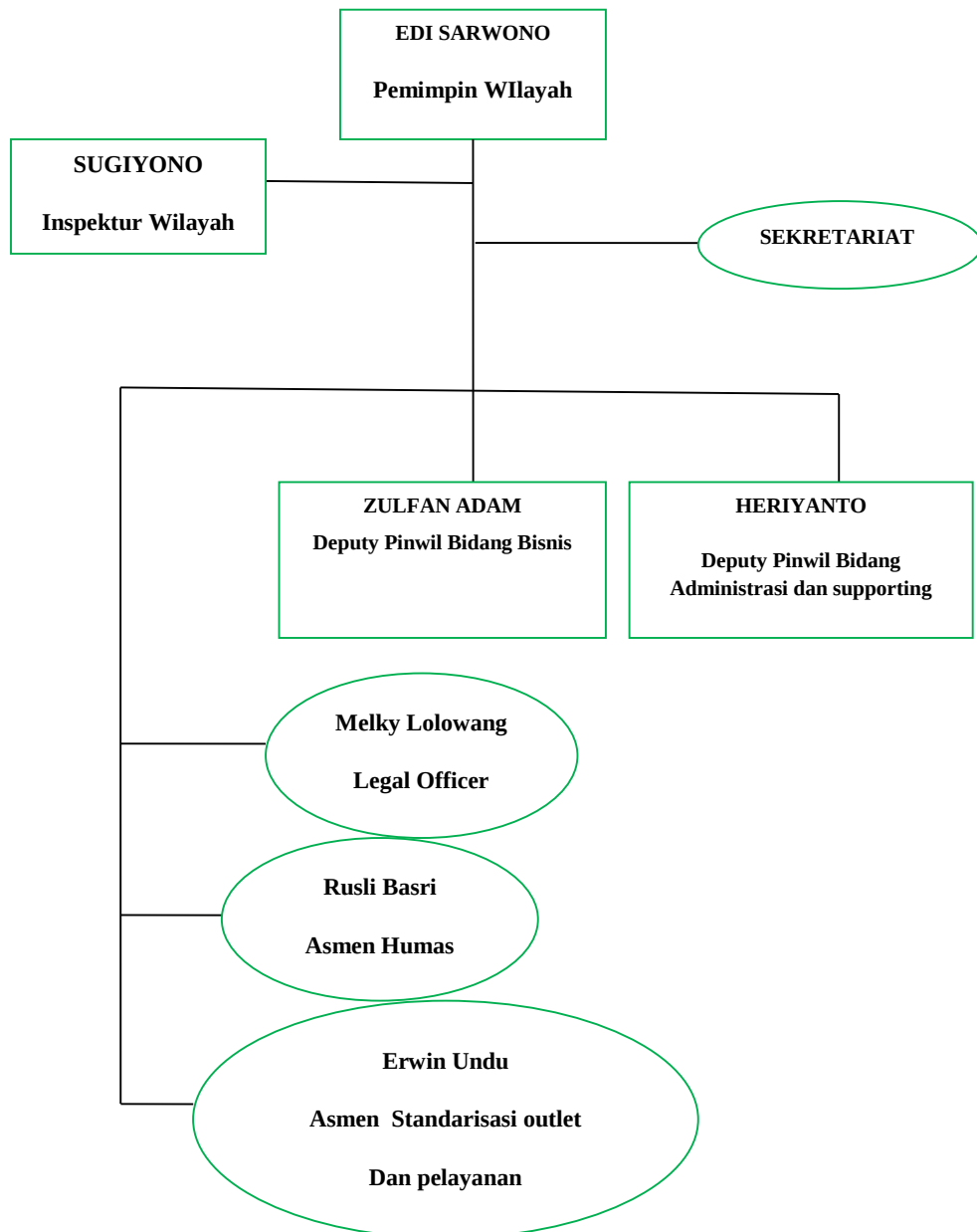
Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang

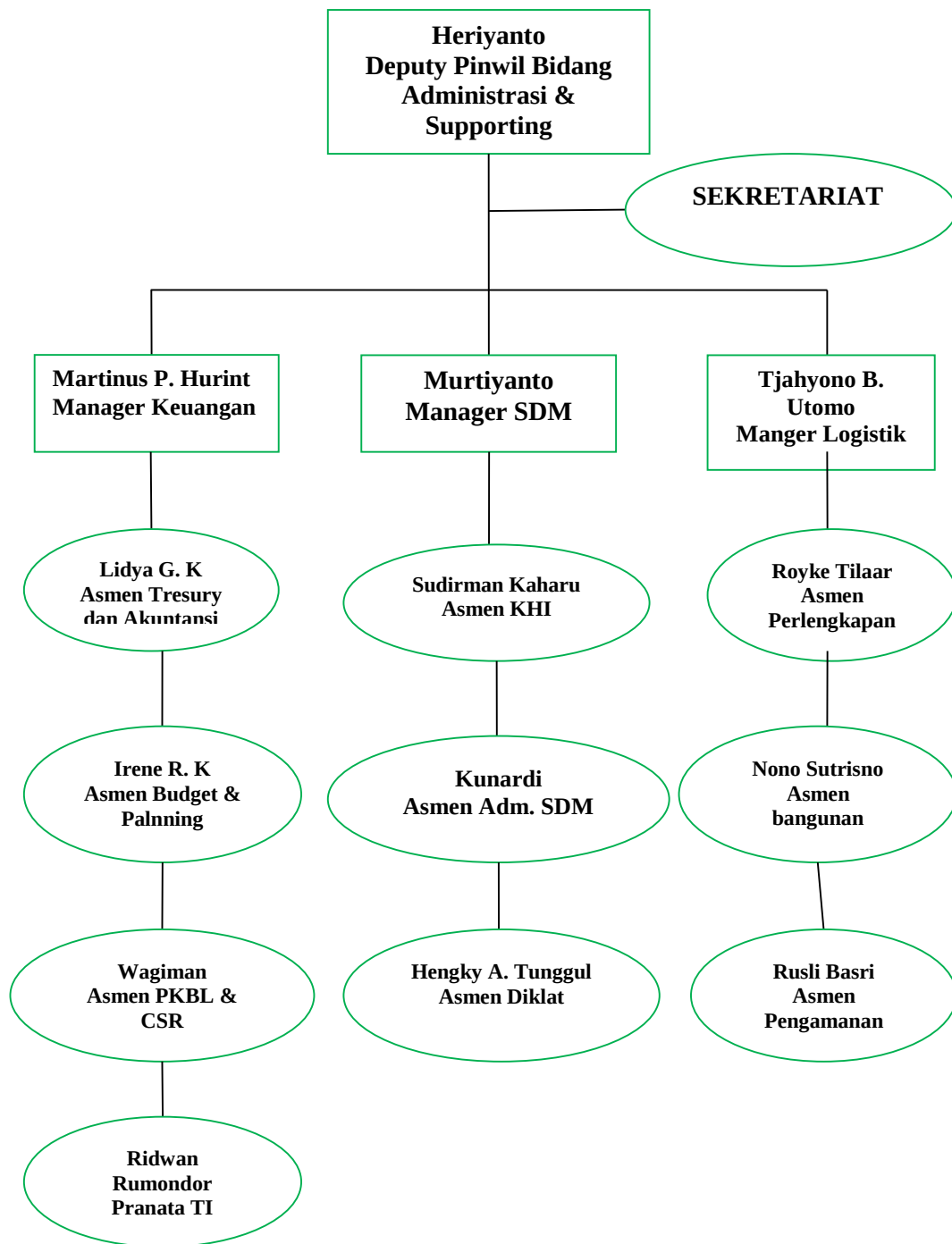
kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

A. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

STRUKTUR ORGANISASI PT PEGADAIAN (PERSERO)

KANTOR WILAYAH V MANADO





VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

MISI

1. Memeberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong kebutuhan ekonomi.
 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pihan utama masyarakat.
 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- b. Aktivitas perusahaan

KEGIATAN USAHA PEGADAIAN

PT Pegadaian adalah salah satu lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan peraturan Pemerintah 10 tahun 1990 dan terakhir PP 103 tanggal 10 november 2000 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM), Pegadaian mempunyai misi yaitu :

1. Membantu Program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

RAGAM PRODUK PEGADAIAN

1. Produk Pengkreditan
 - a. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)
 - b. Pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Fidusia)
 - c. Pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
 - d. Pegadaian AMANAH
 - e. Pegadaian ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro)
 - f. Pegadaian SYARIAH
 - g. Pegadaian KREDIT MULTI GUNA
2. Produk Emas
 - a. Pegadain MULIA

- b. Pegadaian Tabungan Emas
 - c. Pegadaian Konsinyasi Emas
3. Produk Aneka Jasa
- a. Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)
 - b. Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)
 - c. Pegadaian Mobile
 - d. Pegadaian Persewaan Gedung
 - e. Pegadaian Jasa Sertifikasi Mulia
 - f. Pegadaian Jasa Taksiran
4. Program Kemitraan Bina lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* (PKBL dan CSR).
5. Jasa Lelang oleh PT. Balai Lelang Artha Gasia sebagai anak perusahaan PT Pegadaian.